

PERANAN BNP2TKI TERHADAP PEKERJA MIGRAN YANG MELANGGAR KLAUSUL PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

TIARA PUTI MARNEZIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dari BNP2TKI atas PMI yang melanggar klausul perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian secara perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui secara keseluruhan hukum yang berlaku. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. BNP2TKI sebagai lembaga non kementerian yang membawahi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering menemukan faktor-faktor yang menyebabkan PMI melanggar klausul perjanjian kerja yang terdiri dari 3 faktor yakni faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor sesama rekan PMI. Namun, faktor yang melatarbelakangi pelanggaran klausul dalam perjanjian kerja haruslah karena ketidaksengajaan. Jika PMI merasa dirugikan, BNP2TKI hadir untuk memberikan perlindungan terkait PMI yang melanggar klausul dalam perjanjian kerja yakni dengan memberikan bantuan hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi antara lain mediasi, konsultasi, advokasi, pelayanan pengaduan serta pengamanan dan pengawasan.

Kata Kunci: Peranan, BNP2TKI, Pekerja Migran Indonesia

**THE ROLE OF BNP2TKI AGAINST MIGRANT WORKERS WHO
BREAK THE CLAUSE OF WORK AGREEMENTS IN LAW
NUMBER 18 YEAR 2017**

TIARA PUTI MARNEZIA

ABSTRACT

This study aims to find out how the form of legal protection from BNP2TKI over PMI violates the work agreement clause in Law Number 18 of 2017. The method used in this research is normative juridical research. The research approach used is a statutory research approach and case. The legislation approach is used to know the whole applicable law. The case approach is used to study legal norms or rules carried out in legal practice. BNP2TKI as a non-ministerial institution which oversees Indonesian Migrant Workers (PMI) often finds factors that cause PMI to violate the clauses of the work agreement which consists of 3 factors, namely environmental factors, family factors and fellow PMI peer factors. However, the factors behind the violation of the clause in the employment agreement must be due to accident. If PMI feels disadvantaged, BNP2TKI is present to provide protection related to PMI that violates the clauses in the work agreement, namely by providing legal assistance through litigation and non-litigation channels including mediation, consultation, advocacy, complaint services and security and supervision.

Keywords: Role, BNP2TKI, Indonesian Migrant Worker